

ABSTRACT

D.I. Yogyakarta Province is included in an area with quite a lot of potential and is the center of economic growth, but there are still problems related to income inequality that may be influenced by several factors. The issuance of Law Number 13 of 2012 concerning the privileges of the special region of Yogyakarta is expected to have an impact on income inequality in districts / cities throughout D.I. Yogyakarta. This is quite interesting when viewed from the DIY Gini Index above the national average while the Human Development Index (HDI) is also high. This is certainly an interesting phenomenon to study related to anomalies that do not usually occur in other areas. This study used secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics and BAPPEDA. This research started from 2004 to 2022 where the conservation carried out included Yogyakarta City, Bantul Regency, Sleman Regency, Gunungkidul Regency, and Kulonprogo Regency. The analytical tool used in this study is descriptive quantitative where using regression analysis of panel data. This research was analyzed before and after the issuance of Law Number 13 of 2012 to observe the changes that have occurred. The variables used in this study are the Gini Index as a dependent variable and HDI variable, economic growth, and poverty as an independent variable.

The results of this study concluded that the HDI variable has a significant positive effect on the Gini Index. This is certainly contrary to theory, so it needs to be studied more deeply in this study. Meanwhile, the variables of economic growth and poverty do not have a significant effect on the Gini Index.

Keywords: income inequality, HDI, economic growth, poverty

INTISARI

Provinsi D.I. Yogyakarta termasuk pada wilayah yang cukup banyak potensi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, namun masih terjadi permasalahan terkait ketimpangan pendapatan yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta diharapkan memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di seluruh D.I. Yogyakarta. Hal yang cukup menarik ketika dilihat dari Indeks Gini DIY diatas rata-rata nasional sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tinggi. Hal ini tentunya menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji terkait anomali yang tidak biasanya terjadi di daerah-daerah lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika dan BAPPEDA. Penelitian ini dimulai dari tahun 2004 hingga 2022 dimana obeservasi yang dilakukan diantaranya Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, dan Kab. Kulonprogo. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dimana dilakukan analisis regresi data panel. Penelitian ini dilakukan analisis sebelum dan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dimana untuk mengamati perubahan yang telah terjadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks Gini sebagai variabel dependen dan variabel IPM, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan sebagai variabel independen.

Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa variabel IPM berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Gini. Hal ini tentunya bertentangan dengan teori sehingga perlu dikaji lebih mendalam pada penelitian ini. Sedangkan untuk variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Gini.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan